

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2022

Catherine Meidina^{a,1*}, Wenni Anggita^{a2}, Vehtasvili^{a3}

^aUniversitas Bangka Belitung, Pangkalpinang, Indonesia

¹catherinecatherine3101@gmail.com*

*korespondensi penulis

Received: 19 Mei 2024; Revised: 16 September 2024; Accepted: 27 September 2024

Abstrak

Berdasarkan beberapa rasio yaitu Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian, Rasio Derajat Kemandirian, Rasio Derajat Ketergantungan, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang datanya diperoleh dari situs resmi Badan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung dengan prosedur dokumentasi. Beberapa rasio keuangan dihitung untuk menganalisis data. Terdapat bukti kuat bahwa Rasio Efektivitas PAD merupakan salah satu metrik yang paling berhasil. Biaya operasional masih merupakan sebagian besar pendanaan, sehingga Rasio Keserasian masih di bawah standar. Rasio Derajat Ketergantungan yang sangat tinggi kontras dengan Rasio Derajat Kemandirian Fiskal yang sederhana dan pola partisipasi yang bersifat relasional. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang rendah mengindikasikan bahwa ada beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah, Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Derajat Kemandirian Fiskal, Rasio Derajat Ketergantungan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Abstract

Based on a number of ratios including the PAD Effectiveness Ratio, the Compatibility Ratio, the Fiscal Independence Degree Ratio, the Dependency Degree Ratio, and the Fiscal Decentralisation Degree Ratio this research aims to evaluate Bangka Belitung Province's financial performance from 2020 to 2022. This study employed a descriptive quantitative approach, getting its data from the Bangka Belitung Province Regional Finance Agency's official website using documentation procedures. Several financial ratios were computed in order to analyse the data. There is strong evidence that the PAD Effectiveness Ratio is among the most successful metrics. Operating expenses still account for the vast majority of funding, hence the Coherence Ratio remains subpar. A very high Dependency Degree Ratio contrasts with a modest Fiscal Independence Degree Ratio and a pattern of relational participation. The modest Fiscal Decentralisation Degree Ratio indicates that there has been some success in implementing fiscal decentralisation.

Keywords : Financial Performance, Locally-Generated Revenue Effectiveness Ratio, Harmony Ratio, Degree of Fiscal Independence Ratio, Degree of Dependency Ratio, Degree of Fiscal Decentralization Ratio

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama pada level lokal. Pengelolaan dari keuangan yang efektif oleh pemerintah di daerah merupakan komponen kunci dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut (Soraida, 2022). Dasar hukum yang penting untuk pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Yulinchton *et al.*, 2022). Meskipun demikian, implementasi regulasi ini sering kali dihadapkan pada tantangan dan kompleksitas yang signifikan. Pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup aspek regulatif, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor internal dan juga eksternal yang dimana secara kolektif memengaruhi kinerja keuangan.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah, yang menawarkan potensi signifikan untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih selaras dengan kebutuhan dan karakteristik lokal (Mardiasmo, 2021). Dengan memperluas kewenangan fiskal, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk merancang kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan komunitas. Namun, penerapan desentralisasi fiskal tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal, ketimpangan pendapatan antarwilayah, dan ketergantungan yang tinggi pada dana pemerintah pusat, masih menjadi hambatan utama.

Indikator utama yang menandakan kemampuan dari suatu daerah atau wilayah dalam melaksanakan tugas dari otonomi daerah adalah kapasitas finansialnya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan tanpa ketergantungan berlebih pada pemerintah pusat (Harefa *et al.*, 2018). Dengan demikian, daerah yang mampu mengimplementasikan otonomi adalah daerah yang memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk mengelola administrasinya secara mandiri. PAD menjadi elemen krusial dalam hal menentukan sejauh mana suatu wilayah atau daerah dapat beroperasi secara otonom dengan kemandirian yang sejati dan tanggung jawab yang luas (Karianga, 2017).

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu meningkatkan PAD guna memperkuat kemandirian finansial. Meskipun kerangka hukum telah disediakan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, implementasi kebijakan ini tetap dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas. Salah satu persoalan utama di Bangka Belitung adalah rendahnya tingkat kemandirian fiskal. LKPD pada tahun 2020 menunjukkan bahwa porsi terbesar dari pendapatan di daerah sebagian besar masih berasal dari DAU, yang mencerminkan ketergantungan yang bisa tergolong tinggi pada bantuan pemerintah pusat. Ketergantungan jangka panjang pada DAU dianggap tidak berkelanjutan karena alokasi dana tersebut sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Provinsi Bangka Belitung yang berada di posisi level yang rendah dengan memiliki pola yaitu hubungan yang bersifat konsultatif selama periode 2016-2018 (Zukhri, 2020). Tingkat dari ketergantungan yang bisa terbilang sangat tinggi ini membatasi fleksibilitas dan otonomi daerah dalam merencanakan dan melaksanakan

program-program pembangunan lokal. Selain itu, tingkat desentralisasi fiskal di Bangka Belitung pada periode tersebut berada pada kategori sedang hingga cukup.

Meskipun ada perbaikan dalam desentralisasi fiskal dari tahun 2016 hingga 2018, tidak semua daerah mampu memanfaatkan kewenangan fiskalnya secara optimal, yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan serta menghambat potensi pertumbuhan ekonomi daerah. Ketimpangan pendapatan antarwilayah juga menjadi masalah serius, karena beberapa daerah menghadapi kesulitan dalam mengoptimalkan sumber daya keuangannya, sementara daerah lainnya berhasil, yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan di seluruh provinsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan melakukan eksplorasi dan analisis terhadap kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, terutama selama periode 2020-2022. Pengelolaan keuangan di pemerintah daerah ini tercantum atau terdapat di APBD, yang memberikan cerminan dari kemampuan untuk membiayai untuk keperluan tugas-tugas pemerintahan, proyek-proyek pembangunan, serta layanan publik. Analisis kinerja ini dapat dilakukan melalui pengukuran berbagai rasio seperti efektivitas PAD, keserasian, kemandirian fiskal, desentralisasi fiskal, dan tingkat ketergantungan, yang dapat memberikan gambaran tentang kinerja keuangan pemerintah provinsi Bangka Belitung selama periode 2020-2022.

Beberapa studi terdahulu telah mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Misalnya, Oktrivina *et al.* (2020) menemukan bahwa kinerja keuangan di Depok dinilai cukup memadai melalui segi rasio desentralisasi fiskal, sedang dari segi rasio kemandirian, sangat efektif dalam rasio efektivitas PAD, cukup efisien dari segi rasio efisiensi, namun kurang memadai dalam rasio keserasian karena mayoritas anggaran masih difokuskan pada belanja operasional, yang menyebabkan rendahnya rasio belanja modal. Sebaliknya, penelitian Melmambessy (2022) Data ini menunjukkan bahwa antara tahun 2017 dan 2019, rasio kemandirian keuangan Kota Jayapura tergolong sedang. Kota ini sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan provinsi, dan rasio desentralisasi fiskalnya rendah, yang menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya diterapkan. Rasio efektivitas PAD yang tinggi mengindikasikan bahwa target PAD yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jayapura tercapai dengan sangat efisien.

Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunjukkan kinerja keuangan yang tidak stabil. Oleh karena itu, penelitian ini akan digunakan untuk melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung 2020-2022."

KAJIAN PUSTAKA

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

APBD merupakan rencana untuk keuangan dimana telah dirancang untuk suatu wilayah dan diukur dalam bentuk moneter. APBD ini terdiri dari dua komponen dimana pendapatan, yang mencakup sumber serta jumlah dalam satuan rupiah, serta belanja, yang melibatkan aspek perencanaan dan nilai yang juga dihitung dalam rupiah (Mustanir *et al.*, 2023). Berdasarkan dari UU No. 17 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang Keuangan Negara, APBD berfungsi sebagai rencana keuangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan layanan publik. APBD juga berperan sebagai

instrumen kebijakan untuk meningkatkan kualitas dari layanan publik serta kesejahteraan dari masyarakat di suatu daerah (Amin, 2019). Anggaran ini mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut.

LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

Semua lembaga, termasuk dari pemerintah daerah, harus menyusun laporan terutama laporan keuangan untuk bertanggung jawab atas penggunaan dari dana publik. Ini terutama berlaku untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Djanegara, 2017). Kinerja keuangan organisasi ditunjukkan oleh LKPD. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus diikuti dalam penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Menurut Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang Keuangan Negara, laporan keuangan yang dibuat dengan menggunakan SAP berbasis akrual harus mengutamakan efisiensi biaya sekaligus meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan, pengguna, dan pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya badan yang berwenang untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa contoh dari laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut: CALK, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Otonomi Daerah

Otonomi dalam pemerintahan dan pengelolaan kepentingan daerah didefinisikan dalam UU No. 32 tahun 2004 (sekarang UU No. 12 tahun 2008) sebagai kekuasaan dan tanggung jawab entitas otonom untuk mengambil keputusan tentang berbagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah. Otonomi ini memberikan bentuk wewenang kepada suatu daerah untuk daerah itu mengelola, mengawasi, serta memajukan urusan pemerintahan mereka sendiri, disesuaikan dengan kapasitas masing-masing daerah dan diatur oleh kerangka hukum yang berlaku (Sudaryo *et al.*, 2021).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah atau penganggaran lokal melibatkan perencanaan kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk moneter selama periode tertentu (Asyiah, 2018). Anggaran daerah, yang juga dikenal sebagai laporan keuangan pemerintah daerah, berfungsi sebagai instrumen kebijakan utama bagi pemerintah lokal. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menegaskan bahwa keuangan daerah ini sebagai keseluruhan hak dan juga kewajiban daerah yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan lokal, yang dapat diukur dalam istilah moneter, termasuk aset yang terkait dengan berupa hak serta kewajiban tersebut.

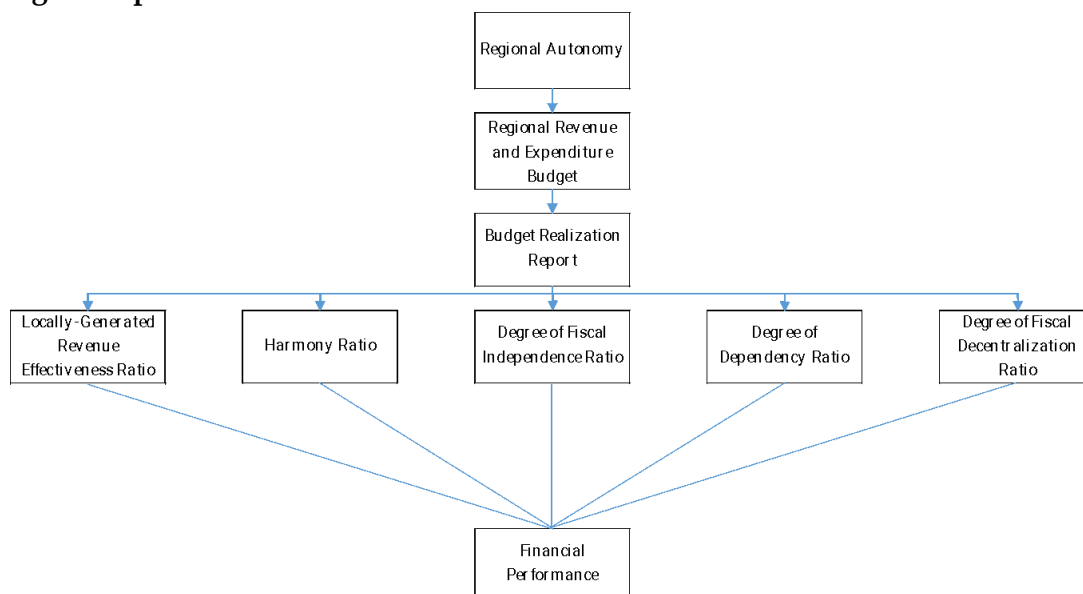
Dalam rangka memaksimalkan layanan publik, meningkatkan kesejahteraan konstituen mereka, dan memanfaatkan sumber daya keuangan mereka dengan lebih baik, pemerintah daerah mengawasi anggaran daerah (Khusaini, 2018). Pemerintah daerah harus menyediakan laporan realisasi, neraca, laporan arus kas, dan komentar yang menyertai laporan keuangan untuk menjamin pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Kinerja Keuangan di Pemerintah

Kinerja pemerintah daerah merujuk pada tindakan terukur yang dilakukan oleh suatu daerah, yang menjadi indikator utama kemampuan dalam menerapkan otonomi daerah (Melmambessy, 2022). Kinerja ini mencakup kapasitas wilayah untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber pendapatan lokal, yang pada gilirannya menentukan kinerja keuangannya. Hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan daerah dan mendukung pemerintahan yang efektif, layanan publik, serta pembangunan daerah, tanpa bergantung sepenuhnya pada dukungan pemerintah pusat (Dai *et al.*, 2023). Menurut Dai *et al.* (2023), yang dikutip dalam buku "Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Teluk Tomini," penilaian kinerja keuangan di pemerintah daerah dapat dilihat melalui laporan keuangan tahunan mereka. Kinerja keuangan yang optimal mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.

Menilai kinerja keuangan daerah melibatkan analisis rasio keuangan yang memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja pemerintah lokal. Rasio-rasio ini mencakup aspek pendapatan seperti desentralisasi, kemandirian, ketergantungan, dan efektivitas PAD. Sementara itu, efisiensi serta pengeluaran daerah ini dapat dievaluasi melalui rasio-rasio yang relevan.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk penelitiannya dengan menganalisis rasio keuangan seperti rasio keserasian, derajat desentralisasi fiskal, derajat ketergantungan fiskal, derajat efektivitas pendapatan daerah, dan derajat efektivitas pendapatan daerah. Data untuk penelitian ini berasal dari situs web dinas keuangan daerah dan dikumpulkan di wilayah Provinsi Bangka Belitung antara tahun 2020 dan 2022. Data sekunder diambil dari laporan keuangan tahunan pemerintah provinsi Bangka Belitung tahun 2020-2022. Laporan realisasi APBD Provinsi Bangka Belitung termasuk dalam laporan keuangan ini.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sebagai salah satu strategi untuk menganalisis data. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara metodis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara variabel-variabel penting dalam setting penelitian melalui metodologi deskriptif kuantitatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi latar belakang mengenai masalah yang diteliti, yaitu Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Bangka Belitung untuk tahun 2020-2022, inklusif, adalah subjek dari penelitian ini. Rasio-rasio keuangan seperti efektivitas PAD, keserasian, pertumbuhan, derajat kemandirian fiskal, ketergantungan, dan rasio desentralisasi fiskal dihitung sebagai bagian dari analisis data. Presentasi tabel akan diberikan ketika rasio-rasio ini telah dihitung. Selain itu, hasil ini akan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan pemerintah provinsi Bangka Belitung pada tahun 2020-2022. Informasi mengenai rasio-rasio keuangan tersebut disajikan di bawah ini.

Rasio Efektivitas PAD

Dengan membandingkan potensi aktual daerah dengan target PAD, rasio efektivitas ini menunjukkan seberapa jauh pemerintah daerah telah mencapai target (Fitriandi, 2022). Tujuan dari metrik ini adalah untuk membandingkan realisasi pendapatan aktual dengan tujuan yang direncanakan untuk mengevaluasi pencapaian anggaran. Jika rasio efektivitas setidaknya satu, atau seratus persen, kinerja daerah akan dianggap sangat baik. Oleh karena itu, kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya berbanding lurus dengan rasio efektivitas.

Table 1. Kriteria PAD

Kriteria	%
Sangat Efektif	$X > 100\%$
Efektif	$X = 100\%$
Cukup Efektif	$90\% < X < 99\%$
Kurang Efektif	$75\% < X < 89\%$
Tidak Efektif	$X < 75\%$

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024.

Rasio Keserasian

Efisiensi dalam mengalokasikan dana antara belanja pembangunan/modal dan belanja rutin/operasional ditunjukkan oleh rasio ini (Ariadi, 2021). Proporsi dana yang rendah yang dialokasikan untuk belanja pembangunan/modal, yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur ekonomi bagi masyarakat, mengindikasikan tingginya proporsi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/operasional, dan sebaliknya.

Rasio ini ditentukan dengan menggabungkan rasio belanja operasi dengan rasio belanja modal. Rasio belanja operasional memberikan gambaran mengenai proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasional dengan membandingkan keduanya. Istilah "operasional" mengacu pada pengeluaran jangka pendek, rutin, atau berulang yang manfaatnya habis dalam satu tahun fiskal. Anggaran operasional biasanya mencapai enam puluh hingga sembilan puluh persen dari keseluruhan anggaran suatu daerah. Porsi yang lebih besar dari pengeluaran operasional umumnya terlihat di

daerah dengan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan pendapatan yang lebih rendah (Oktrivina *et al.*, 2020).

Rasio belanja modal didefinisikan sebagai jumlah seluruh belanja modal yang direalisasikan dibagi dengan jumlah seluruh belanja daerah. Seberapa besar anggaran pemerintah daerah digunakan untuk belanja modal pada tahun fiskal tertentu ditunjukkan oleh proporsi ini. Investasi dalam belanja modal memberikan keuntungan jangka menengah dan panjang yang berkelanjutan. Biasanya, antara lima persen hingga dua puluh persen dari seluruh belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal (Oki, 2023).

Dinamika kegiatan pembangunan dan jumlah investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan sangat mempengaruhi rasio ideal belanja modal terhadap keseluruhan pendapatan dan anggaran daerah, yang tidak memiliki standar yang tetap. Namun demikian, dalam membantu pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah masih memainkan peran yang signifikan. Akibatnya, persentase belanja modal yang relatif rendah harus ditingkatkan jika tuntutan pembangunan daerah ingin dipenuhi.

Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian fiskal adalah cara untuk mengukur seberapa baik pemerintah daerah dapat mendanai kegiatan operasional, layanan publik, dan proyek-proyek pembangunan dengan menggunakan uang pajak dan retribusi (Fitriandi, 2022). Dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, tingkat kemandirian fiskal dapat diketahui. Kemandirian fiskal suatu daerah sebanding dengan rasio PAD terhadap dana transfer. Rasio yang lebih tinggi mengindikasikan anggaran yang lebih otonom. Ada empat bentuk hubungan situasional yang berbeda yang muncul selama proses pemberian otonomi daerah, seperti yang diuraikan dalam UU No. 34/2004 tentang Perimbangan Keuangan:

- a. Pola hubungan instruktif (0% - 25%), yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat memainkan peran yang lebih dominan dalam memberikan arahan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah.
- b. Pola hubungan konsultatif (25% - 50%), yang menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk bertindak secara mandiri mempengaruhi tingkat intervensi dari pemerintah pusat.
- c. Pola hubungan partisipatif (50% - 75%), di mana kemampuan besar pemerintah daerah secara bertahap mengurangi peran pemerintah pusat.
- d. Pola hubungan delegatif (75% - 100%), di mana daerah menerapkan otonomi sepenuhnya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintah pusat tidak lagi terlibat.

Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan finansial mencerminkan sejauh mana pemerintah provinsi atau nasional memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah daerah (Sucahyo *et al.*, 2023). Rasio ketergantungan fiskal adalah hasil dari membagi pendapatan transfer daerah dengan pendapatan daerah secara keseluruhan. Ketika rasio ini meningkat, sejauh mana suatu daerah bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah federal akan disorot.

Table 2. Kriteria Tingkat Ketergantungan

Kriteria	%
Sangat Rendah	0% - 10%
Rendah	10,1% - 20%
Sedang	20,1% - 30%
Cukup Tinggi	30,1% - 40%
Tinggi	40,1% - 50%
Sangat Tinggi	> 50%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Menurut Sucahyo *et al.* (2023), rasio desentralisasi fiskal menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung inisiatif pembangunan. Sejauh mana pemerintah daerah siap untuk melaksanakan otonomi mereka sendiri diukur dengan metrik ini. Rasio desentralisasi fiskal berkorelasi positif dengan kapasitas keuangan daerah untuk membiayai perluasan otonomi daerah. Untuk mendapatkan persentase ini, kami membagi PAD dengan total pendapatan daerah.

Table 3. Kriteria Rasio Desentralisasi Fiskal

Kriteria	%
Sangat Buruk	0% - 10%
Buruk	10,1% - 20%
Cukup	20,1% - 30%
Memadai	30,1% - 40%
Baik	40,1% - 50%
Sangat Baik	> 50%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024.

Pengukuran Variabel

Table 4. Pengukuran Variabel

Variabel	Rumus dan Referensi
Rasio Efektivitas PAD	$= \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total Anggaran PAD}} \times 100\%$ <p>(Fitriandi, 2022)</p>
Rasio Keserasian	<p>Rasio Belanja Modal</p> $= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ <p>Rasio Belanja Operasi</p> $= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ <p>(Ariadi, 2021)</p>

Rasio Kemandirian Fiskal	$= \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Dana Transfer}} \times 100\%$
	(Fitriandi, 2022)
Rasio Ketergantungan	$= \frac{\text{Total Dana Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
	(Sucahyo <i>et al.</i> , 2023)
Rasio Desentralisasi Fiskal	$= \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
	(Sucahyo <i>et al.</i> , 2023)

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024.

PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Provinsi Bangka Belitung Jika Ditinjau dari Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kinerja keuangan yang berhasil didefinisikan sebagai rasio yang paling sedikit seratus persen. Dengan demikian, menurut Fitriandi (2022), kemampuan area untuk melaksanakan tanggung jawabnya ditingkatkan dengan rasio efektivitas yang lebih besar.

Table 5. Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Total Realisasi PAD	Total Anggaran PAD	Rasio Efektivitas PAD
2020	683,432,674,809.81	748,055,044,035.47	91.36
2021	895,763,128,991.25	767,219,366,538.00	116.75
2022	1,090,477,839,965.10	938,568,347,761.00	116.19

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024.

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai hasil keuangan yang sangat efektif, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. Dengan rasio efektivitas sebesar 91,36% pada tahun 2020, PAD dianggap sangat berhasil. Pertumbuhan yang mengesankan sebesar 116,75 persen tercatat pada tahun 2021, menempatkannya dalam kategori sangat efektif. Meskipun mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, rasio efektivitas tetap berada pada kategori sangat efektif pada tahun 2022 sebesar 116,19%. Secara keseluruhan kinerja keuangan Bangka Belitung masih dinilai sangat efektif dengan rata-rata 108,1%, meskipun terjadi volatilitas karena berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Bangka Belitung telah berhasil mencapai hasil yang memuaskan dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Penelitian ini didukung oleh temuan Melmambessy (2022), menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD sebesar 103,35%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jayapura telah melampaui target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi yang ada di daerah tersebut. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Oktaviani *et al.* (2021), yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara dari 2016 hingga 2019 juga menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, dengan pemerintah berhasil merealisasikan PAD mendekati atau bahkan melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menyiratkan bahwa Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah berhasil menunjukkan kinerja keuangan yang optimal, khususnya dalam merealisasikan PAD dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Hal ini juga menunjukkan adanya praktik manajemen keuangan yang efektif dan transparan, serta menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja Keuangan Provinsi Bangka Belitung Ditinjau dari Rasio Kecerasan

Dalam studi ini, sejumlah rasio keuangan, termasuk Rasio Kecerasan, digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien pemerintah daerah membagi anggarannya antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Sartika & Pratama, 2019). Rasio Belanja Operasional dan Rasio Belanja Modal adalah dua faktor utama yang digunakan untuk menghitung rasio ini. Biasanya, belanja operasi mendominasi pengeluaran daerah, berkisar antara 60% hingga 90%, sedangkan belanja modal hanya mengambil porsi 5% hingga 20%.

Table 6. Rasio Belanja Operasi

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2020	1,741,021,626,249.62	2,203,628,597,880.09	79.01
2021	1,682,056,492,509.43	2,115,893,278,614.96	79.50
2022	1,586,471,734,951.41	1,945,979,205,203.28	81.53

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024.

Table 7. Rasio Belanja Modal

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2020	436,502,107,450.47	2,203,628,597,880.09	19.81
2021	428,654,245,651.53	2,115,893,278,614.96	20.26
2022	354,008,245,838.87	1,945,979,205,203.28	18.19

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024.

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Tabel 6 dan 7, rasio keserasian rata-rata untuk Provinsi Bangka Belitung selama tiga tahun anggaran (2020–2022) menunjukkan bahwa rasio belanja modal rata-rata adalah 19,42% dan rasio belanja operasional rata-rata adalah 80,01%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran operasional menyerap sebagian besar anggaran daerah, sementara pengeluaran modal hanya menyumbang sebagian kecil. Fokus utama pengeluaran daerah adalah pada belanja pegawai dan belanja barang. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tampaknya lebih memprioritaskan kebutuhan operasional dibandingkan dengan pembangunan daerah, seperti yang terlihat dari alokasi belanja modal yang terbatas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Oktrivina *et al.* (2020), karena Pemerintah Kota Depok mencurahkan sebagian besar anggaran untuk pengeluaran rutin, maka pengeluaran pembangunan kurang didanai dibandingkan dengan pengeluaran rutin. Temuan serupa juga dilaporkan dalam analisis Deswira (2022), yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari 2016 hingga 2020 juga menunjukkan proporsi belanja operasional yang terlalu tinggi dibandingkan dengan belanja modal.

Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyeimbangkan alokasi dana antara belanja operasional dan belanja pembangunan. Dengan fokus yang lebih besar

pada belanja operasi dan hanya sedikit untuk belanja modal, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan investasi pada sektor pembangunan daerah agar mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Langkah ini akan membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memperkuat visi pembangunan di Provinsi Bangka Belitung.

Kinerja Keuangan Provinsi Bangka Belitung Jika Ditinjau dari Rasio Kemandirian Fiskal

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dianalisis menggunakan sejumlah rasio keuangan, termasuk Rasio Kemandirian Fiskal. Rasio ini menunjukkan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai layanan publik, inisiatif pembangunan, dan operasional pemerintah berdasarkan pajak dan retribusi—yang merupakan sumber pendapatan lokal yang signifikan (Sartika & Pratama, 2019).

Table 8. Rasio Kemandirian Fiskal

Tahun	Total PAD	Total Dana Transfer	Rasio Kemandirian Fiskal
2020	683,432,674,809.81	1,604,813,796,610.00	42.59
2021	895,763,128,991.25	1,750,322,876,331.00	51.18
2022	1,090,477,839,965.10	1,790,988,971,927.00	60.89

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024.

Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Provinsi Bangka Belitung selama periode tiga tahun (2020–2022) dikategorikan sebagai moderat dalam pola hubungan partisipatif (51,55%), yang menunjukkan peran pemerintah provinsi yang semakin berkembang dan peran pemerintah pusat yang semakin berkurang. Hal ini menunjukkan kompetensi daerah yang semakin meningkat dalam membentuk daerah otonom. Sebagai salah satu penghasil pendapatan utama di daerah ini, Provinsi Bangka Belitung dapat mendanai layanan publik, proyek pembangunan, dan operasi pemerintah dengan bantuan pajak dan retribusi. Untuk mendanai pembangunan daerah, daerah ini dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil penelitian ini sejalan dengan kesimpulan studi Santanu *et al.* (2022), yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali termasuk dalam pola hubungan partisipatif dan memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang moderat (73,75%). Ini menunjukkan bahwa otonomi daerah hampir sepenuhnya diterapkan di daerah tersebut. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Putra (2022), yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian finansial Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2014 hingga 2020 termasuk dalam kategori kapasitas fiskal moderat atau pola hubungan partisipatif.

Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dengan mengandalkan sumber pendapatan lokal seperti pajak dan retribusi, telah terbukti mampu secara mandiri membiayai operasional pemerintah dan proyek pembangunan, serta menyediakan layanan kepada masyarakat. Daerah dapat memaksimalkan sumber dayanya sendiri untuk membantu pembiayaan pembangunan melalui hubungan partisipatif yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Kinerja Keuangan Provinsi Bangka Belitung Jika Ditinjau dari Rasio Ketergantungan

Untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, penelitian ini menggunakan berbagai parameter keuangan, salah satunya adalah Rasio Ketergantungan. Dengan

membandingkan seluruh jumlah pendapatan daerah dengan bantuan, termasuk dana transfer, yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka dapat dihitung tingkat ketergantungannya (Putra, 2022).

Table 9. Rasio Ketergantungan

Tahun	Total Dana Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan
2020	1,604,813,796,610.00	2,405,260,307,097.81	66.72
2021	1,750,322,876,331.00	2,708,948,673,048.25	64.61
2022	1,790,988,971,927.00	2,881,466,811,892.10	62.16

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024.

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 9, Rasio Ketergantungan untuk periode tiga tahun (2020-2022) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tergolong sangat tinggi, dengan rata-rata 64,49%. Berdasarkan temuan ini, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sangat bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kesimpulan studi Putra (2022), yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan finansial Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2014 hingga 2020 berkisar antara 59,67% hingga 66,67% atau dalam kategori sangat tinggi, yang mengindikasikan ketergantungan yang tinggi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Zuhri (2020), dimana tingkat ketergantungan finansial Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2016 hingga 2018 berkisar antara 61,05% hingga 68,41% atau dalam kategori sangat tinggi, menunjukkan ketergantungan yang besar pada dana dari pemerintah pusat.

Temuan-temuan ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Ketika masyarakat sangat bergantung pada satu sama lain, akan sulit bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan pengeluaran.

Kinerja Keuangan Provinsi Bangka Belitung Jika Ditinjau dari Rasio Desentralisasi Fiskal

Penelitian ini mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dengan menggunakan beberapa parameter keuangan, termasuk Rasio Desentralisasi Fiskal. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan dana untuk proyek-proyek pembangunan dan dengan demikian menunjukkan kesiapan mereka untuk melaksanakan otonomi daerah. Rasio desentralisasi fiskal yang lebih besar mengindikasikan bahwa suatu daerah memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik untuk mendukung otonomi daerah (Sucahyo et al., 2023).

Table 10. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	Total PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal
2020	683,432,674,809.81	2,405,260,307,097.81	28.41
2021	895,763,128,991.25	2,708,948,673,048.25	33.07
2022	1,090,477,839,965.10	2,881,466,811,892.10	37.84

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024.

Rasio desentralisasi fiskal (rata-rata 33,11%) untuk tiga periode (2020–2022) menunjukkan kinerja keuangan yang rata-rata untuk Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan data di Tabel 10. Desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung masih berada dalam kisaran yang sesuai atau cukup. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai menangani keuangan mereka sendiri secara lebih efisien dan otonom.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Zuhri (2020), yang menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Provinsi Bangka Belitung berada dalam kategori yang memadai, dengan rentang antara 29,47% hingga 33,26% pada periode 2016 hingga 2018. Hasil ini juga sejalan dengan analisis Putra (2022), yang menemukan bahwa tingkat desentralisasi fiskal di Provinsi Kepulauan Riau dari 2014 hingga 2020 berada pada tingkat yang sesuai dengan persentase 35,69%. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah mulai membiayai pembangunan dan proyek-proyek regionalnya.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa Pemerintah Provinsi Bangka Belitung perlu melanjutkan upaya untuk memperkuat desentralisasi fiskal. Meskipun telah ada kemajuan dalam memperkuat otonomi daerah dan kapasitas keuangan, masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut untuk mencapai tingkat yang optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan, berdasarkan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menunjukkan hasil yang beragam dari beberapa dimensi. Sebagai permulaan, pemerintah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam merealisasikan uang daerah, karena Rasio Kinerja Pendapatan Asli Daerah (108,1% rata-rata selama tiga tahun terakhir) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dinilai sangat tinggi. Melihat anggaran melalui lensa Rasio Keserasian, bagaimanapun, tampaknya biaya operasional masih mengambil bagian terbesar, sementara belanja modal menyumbang sebagian kecil. Selain itu, Rasio Kemandirian Fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang tidak terlalu besar, seiring dengan pola perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Provinsi Bangka Belitung, di sisi lain, masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat, seperti yang terlihat pada Rasio Ketergantungan. Terakhir, desentralisasi fiskal telah membaik, namun masih dalam taraf cukup, berdasarkan Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal. Ini merupakan tanda bahwa pemerintah kota dan kabupaten mulai menangani anggaran mereka sendiri dengan lebih baik. Mengurangi ketergantungan pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan meningkatkan distribusi dana untuk investasi modal guna mendukung pembangunan daerah secara lebih efektif merupakan hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Daftar Pustaka

- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=tg6QDwAAQBAJ>
- Ariadi, W. (2021). *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep Dan Analisis*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=e-hBEAAAQBAJ>
- Asyiah, N. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=BC5aDwAAQBAJ>
- Dai, S. I., Akib, F. H. Y., Rizki, M., & Riswanto, Y. (2023). *Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini*. CV. Bintang Semesta Media. <https://books.google.co.id/books?id=C3vcEAAAQBAJ>
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 72–88. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>
- Djanegara, M. S. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Kesatuan Press. <https://books.google.co.id/books?id=hfhmDwAAQBAJ>
- Fitriandi, P. (2022). *Bunga Rampai Keuangan Negara : Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia Edisi 2020*. PKN STAN Press. <https://books.google.co.id/books?id=U7tYEAAAQBAJ>
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2018). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=N6VeDwAAQBAJ>
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Kencana. https://books.google.co.id/books?id=Glc_DwAAQBAJ
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. UB Press. <https://books.google.co.id/books?id=VOmIDwAAQBAJ>
- Mardiarmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Andi Offset. https://books.google.co.id/books?id=6_BBEAAAQBAJ
- Melmambessy, D. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, KETERGANTUNGAN DAERAH, DESENTRALISASI FISKAL DAN EFEKTIVITAS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 2086–4515.
- Mustanir, A., Salampessy, M., Yudianto, I., Islami, A. Y., Yuliantoro, H. R., Amane, A. P. O., Nugraha, E., & Fahmi, M. (2023). *SISTEM KEUANGAN PEMERINTAHAN*. Global Eksekutif Teknologi. <https://books.google.co.id/books?id=LODGEAAAQBAJ>
- Oki, K. K. (2023). *Otonomi Dan Kinerja Pemerintah Daerah*. PT Pusat Literasi Dunia. <https://books.google.co.id/books?id=vEzMEAAAQBAJ>
- Oktaviani, E., Risma Deviyanti, D., & Pattisahusiwa, S. (2021). Analisis rasio keuangan daerah pada kabupaten kutai kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(1), 2022–2077.
- Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN (STUDI KASUS: PEMERINTAHAN KOTA DEPOK-JAWA BARAT). *Journal IMAGE*, 9(1), 1–19.
- Putra, N. S. (2022). Financial Performance of The Province of Riau Archipelago in The Context of The Degree of Independence, Degree of Dependence, and Fiscal Decentralization. *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS REVIEW (THE JOBS REVIEW)*, 5(1), 13–28.
- Santanu, G., Supiatni, N. N., & Jatiwardani, K. D. (2022). Bali Province Government Financial Performance During Covid-19 Pandemic. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (ICAST-SS 2022)*, 294–299. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-83-1_53
- Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016*. 6(2), 179–188.
- Soraida, S. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen (JEKMA)*,

1(2), 78–82.

- Sucahyo, U. S., Mahastanti, L. A., Damayanti, T. W., & Supramono. (2023). *BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PERSPEKTIF KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH*. Uwais Inspirasi Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=yHaxEAAAQBAJ>
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. (2021). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=dHI9DwAAQBAJ>
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303. <https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>
- Zukhri, N. (2020). KINERJA KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI DERAJAT KEMANDIRIAN, KETERGANTUNGAN, DAN DESENTRALISASI FISKAL. *Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.